



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUCIA WIDIHARSANTI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 68261

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.685.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 102 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
4. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **480.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **727.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.672.577.907**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.564.577.907

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.564.577.907

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.